

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Turki merupakan salah satu negara yang dianggap strategis di dunia dan terletak di kawasan Eurasia, yaitu negara yang berada di kawasan antara Eropa dan Asia. Nilai strategis Turki juga ditunjang dengan letaknya yang berada diantara Laut Mediterania dan Laut Hitam. Negara ini juga merupakan salah satu negara pusat peradaban tertua di dunia yang hingga saat ini telah dihuni oleh lebih dari 74,5 juta penduduk yang mayoritas beragama Islam.<sup>1</sup>

Berdasarkan sejarahnya, Turki telah melewati berbagai fase yang panjang hingga menjadi negara Republik Demokratis dengan sistem pemerintahan parlementer. Turki merupakan negara yang menyimpan sejarah panjang tentang konsepsi kepemimpinan khalifah islamiyah yang kemudian bertransformasi secara drastis menjadi negara sekuler yang lebih demokratis pada masa kepemimpinannya. Mustafa Kemal Attaturk secara resmi pada tanggal 3 Maret tahun 1924 menghapus khalifah di Turki setelah setahun sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai negara republik demokratis dengan sistem pemerintahan parlementer.<sup>2</sup> Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan,

---

<sup>1</sup>*Turkey Country Profile*, BBC 7 Maret 2017, diakses dalam: <http://www.bbc.com/news/world-europe-17988453>, 20 Mei 2017, pukul 20:30 WIB

<sup>2</sup> Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 2, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 231

yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya, oleh karena itu Turki memiliki dua pemimpin utama, yaitu presiden dan perdana menteri.

Terhitung sejak menjadi negara republik demokratis pada tahun 1923, Turki terus berupaya untuk memisahkan nilai-nilai Islam dari kehidupan politik dan pemerintahan. Gagasan sekulerisme ini semakin kokoh karena, konstitusi Turki menghendaki itu, dengan dikawal oleh militer, yang berada di bawah kontrol pemerintahan. Militer adalah tangan besi kekuasaannya untuk mendukung gagasan pemerintah Turki. Ide inilah yang lantas semakin membuat Turki terkesan lebih condong untuk semakin dekat dengan dunia barat dan hal ini dibuktikan dengan keinginan Turki untuk bergabung dengan negara Uni Eropa, namun Uni Eropa akhirnya menangguk proposal pengajuan anggota Turki pada 2005 dan hanya menjadikan Turki sebagai negara kandidat Uni Eropa, bukan negara Anggota.<sup>3</sup>

Alasan yang kedua adalah alasan keadaan politik Domestik Turki yang begitu dinamis dan syarat akan isu kontroversial seperti isu diskriminasi terhadap etnis kurdi sejak rezim AKP (*Adalalet ve Kalkinma Partisi* / Partai Keadilan dan Pembangunan) memimpin dan terutama isu dalam hal kebebasan pers dan media. Uni Eropa sebagai organisasi paling berpengaruh di Eropa tetap menganggap Turki sebagai negara yang berada di “persimpangan jalan” antara demokrasi liberal dan nilai-nilai otoriter. Disebut demikian karena Turki sama sekali tidak menjamin kedaulatan dalam berpendapat bagi penduduknya. Pers dan Media dibungkam dan dimonopoli oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk mereduksi konflik yang

---

<sup>3</sup> *Turkey Country Profile, Op.Cit.*

menyerang pemerintahan.<sup>4</sup> Alasan kedua inilah yang selanjutnya menstimulasi penulis guna mengangkat isu seputar kebebasan pers di Turki yang dimonopoli oleh pemerintah.

Sebagai negara demokratis, seharusnya Turki juga dapat memberikan kedaulatan berpendapat bagi setiap penduduknya, namun hal ini belum diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Turki. Padahal esensi nilai demokrasi bukan hanya untuk kalangan pemerintahan saja, melainkan juga untuk tatanan sosial dalam masyarakat, karena demokrasi pada dasarnya melihat kebebasan pers dan kedaulatan rakyat sebagai 2 lembaga yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilindungi.<sup>5</sup>

Dinamika kebebasan pers dan media di Turki semakin mencuat sejak tahun 2012 ketika Turki menahan beberapa jurnalis yang dianggap sebagai “benalu” bagi pemerintahan negara. Pada tanggal 1 Agustus 2012, Turki telah resmi menjatuhkan vonis hukuman penjara bagi 76 jurnalis media nasional. Vonis ini tentunya menuai kecaman dari berbagai pihak, karena pemerintah dianggap terlalu memproteksi kebebasan press. Menurut laporan *Committee To Protect Journalists* (CPJ), pada tahun 2012 setidaknya 30 persen jurnalis nasional Turki dipenjara tanpa diadili oleh pemerintah. Hal ini juga lantas membuat *image* pemerintah seolah-olah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Kebebasan Pers dan Kedaulatan rakyat yang tidak dikekang oleh pemerintah akan membuat rakyat di sebuah negara akan semakin leluasa untuk menuangkan opini dan aspirasinya untuk seluruh kalangan, khususnya pemerintah. Oleh karena itu, demokrasi pada dasarnya melihat kebebasan pers dan kedaulatan rakyat sebagai 2 lembaga yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilindungi, dalam Alexis De Tocqueville, *Tentang revolusi, demokrasi dan masyarakat*, diterjemahkan oleh: tim penerjemah Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, h. 93-94

buruk karena telah melakukan diskriminasi hukum terhadap kelompok jurnalis media nasional.<sup>6</sup>

Pada saat menjabat sebagai Perdana Menteri, Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2012 tidak segan-segan untuk menutup beberapa perusahaan media yang terlalu mengkritisi kinerja pemerintah. Erdogan juga seringkali melayangkan surat teguran bagi beberapa media dan menghimbau untuk segera memecat jurnalis atau wartawan yang terlalu kritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pemerintah pusat.<sup>7</sup>

Tahun 2015 ketika Erdogan mulai memimpin Turki sebagai presiden, kebebasan pers semakin dikekang. Padahal pada tahun 2003 Turki telah menjamin eksistensi perlindungan hak-hak jurnalis dan media. Namun rezim Partai AKP (*Adalalet ve Kalkinma Partisi* / Partai Keadilan dan Pembangunan) yang dipimpin oleh Erdogan semakin mereduksi adanya kebijakan perlindungan hak-hak perstersebut. Umumnya jurnalis yang ditangkap oleh negara adalah karena dianggap sebagai penyebar propaganda anti pemerintahan dan dianggap sebagai penyebar isu-isu sensitif seperti isu seputar etnis Kurdi di Turki.<sup>8</sup>

Selain CPJ, oraganisasi Internasional lain yang merespon isu krisis pers di Turki adalah *Intetnational Federations of Journalists*(IFJ). IFJ merupakan salah satu NGO perlindungan jurnalis internasional terbesar selain CPJ. IFJ melaporkan Pihak berwenang Turki telah memenjarakan wartawan, mematikan radio dan

---

<sup>6</sup> Tim CPJ, *Crisis In Turkey: The Dark Days of Jailing Journalists and Criminalizing Dissent*, New York: *Committee to Protect Journalists*, 2012, h. 6

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Turkey: Freedom of Pers2016*, diakses dalam: <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/turkey>, 20 Mei 2017, pukul 20.40 WIB.

saluran TV dan menyensor internet untuk membungkam kritik. 122 wartawan dipenjara dan lebih dari 150 media dilarang sejak pertengahan Juli 2016. Lebih dari 2.500 wartawan telah kehilangan pekerjaan mereka dan surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk puluhan pekerja media.<sup>9</sup> Tentunya hal tersebut membuktikan betapa peliknya permasalahan *press freedom* di Turki.

Pada tahun 2016, saat isu kudeta terhadap Erdogan terjadi, Turki kembali melakukan tindakan represifnya terhadap beberapa jurnalis media yang mencoba mengkritisi pemerintah Turki. Pasca peristiwa percobaan kudeta pada bulan Juli 2016, pemerintahan Erdogan setidaknya telah menangkap ratusan jurnalis yang diduga telah menyebar propaganda anti pemerintahan. Setelah tragedi ini, Turki kemudian ditetapkan sebagai negara terburuk bagi para jurnalis di dunia oleh *Committee To Protect Journalists* (CPJ). Urutan kedua negara terburuk bagi para jurnalis adalah Tiongkok, diikuti oleh Iran.

Sebagai salah satu organisasi nonprofit yang bergerak dalam hal perlindungan jurnalis, CPJ tidak hanya membagikan data-data seputar isu-isu yang berkaitan dengan tindakan diskriminatif yang dialami para jurnalis di Turki, melainkan juga turut andil dalam membela dan melindungi para jurnalis nasional di Turki. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh CPJ terkait kasus yang menimpa beberapa jurnalis di Turki adalah memberikan bantuan berupa upaya advokasi bagi para jurnalis yang ditangkap, mengirimkan surat teguran terhadap

---

<sup>9</sup> International Federations of Journalist, *Turkey: Press freedom is essential for democracy, set journalism free!*, 15 juli 2016, diakses dalam: <http://www.ifj.org/campaigns/turkey-press-freedom-is-essential-for-democracy-set-journalism-free/>, 5 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

pemerintah Turki dan upaya-upaya konkret lainnya.<sup>10</sup> Upaya-upaya CPJ inilah yang selanjutnya akan penulis deskripsikan dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dibuat guna sebagai *guidance* unit analisis yang akan penulis bahas dalam penelitian ini . Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana upaya *Committee To Protect Journalists* (CPJ) dalam melindungi kebebasan jurnalis di Turki ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang ditempuh oleh CPJ dalam memberikan perlindungan dan pembelaan hak-hak Jurnalis Turki. Berikut tujuan penelitian ini secara spesifik:

- a. Untuk Mendeskripsikan upaya pembelaan CPJ terhadap jurnalis Turki
- b. Untuk Mendeskripsikan upaya upaya *lobbying* CPJ terhadap pemerintah Turki terkait kebebasan press
- c. Untuk Mendeskripsikan orientasi dan cara kerja CPJ dalam memberikan perlindungan dan pembelaan hak-hak Jurnalis Turki

---

<sup>10</sup> Roy Greenslade, *Persfreedom in Turkey is 'under siege', says CPJ* diakses dalam: <https://www.theguardian.com/media/greenslade/2016/mar/08/press-freedom-group-in-turkey-is-under-siege-says-cpj>, 22 Mei 2017, pukul 21.00 WIB.

### **1.3.2 Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian disini penulis bagi menjadi dua, yaitu:

#### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional dan menambah kajian baru di dalamnya, khususnya yang berkaitan dengan *NGO* sebagai *civil society* kususnya cara kerja sebuah organisasi non profit dunia seperti CPJ dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap jurnalis media di Turki. Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan luas seputar fungsi dan orientasi organisasi non profit dunia seperti CPJ.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis yang berusaha merampungkan penelitian ini dengan baik dan benar sesuai kaidah penelitian, selain itu penulis berharap penelitian ini dapat menyumbang pengetahuan dan rujukan teori bagi siapapun saja yang ingin membahas isu yang berkaitan dengan CPJ dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap jurnalis media di Turki

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan guna meminimalisir kesamaan dengan penelitian-penelitian lainnya, penulis juga sedikit mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas seputar isu yang sangat erat relevansinya dengan penelitian penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini penulis ulas secara singkat

dan jelas, yang kemudian penulis rangkum dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami.

Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh tim CPJ yang berjudul *Turkey's PersFreedom Crisis The Dark Days of Jailing Journalists and Criminalizing Dissent*.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab kriminalisasi terhadap wartawan atau jurnalis media nasional di Turki. Komite untuk Perlindungan Wartawan (CPJ), mengatakan pada awal Agustus 2012, 76 wartawan mendekam di penjara, jumlah paling besar dibandingkan negara manapun di dunia. Direktur CPJ, Joel Simons, mengatakan bahwa kecenderungan Turki untuk menyamakan media yang kritis dengan terorisme tidak dapat diterima.

Pemerintah mengatakan mayoritas dari mereka yang disebut sebagai wartawan yang dipenjara dikenai dakwaan menyangkut keamanan negara dan bukan karena aktivitas jurnalistik mereka. Dari jumlah wartawan yang dipenjara, 70% di antaranya berasal dari Kurdi. Namun penelitian ini menyebutkan bahwa mayoritas jurnalis yang ditangkap karena mereka mengangkat isu seputar etnis kurdi yang dianggap sangat sensitif bagi rezim kala itu.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada kesamaan pada tema besar yang membahas seputar isu tindakan diskriminatif pemerintah terhadap jurnalis di Turki. Perbedaannya pada tema khusus yang penulis pilih. Jika dalam penelitian terdahulu ini membahas seputar faktor-faktor penyebab kriminalisasi terhadap wartawan atau jurnalis media nasional di Turki, sedangkan

---

<sup>11</sup> tim CPJ , *Turkey's PersFreedom Crisis The Dark Days of Jailing Journalists and Criminalizing Dissent* , New York: Committee to Protect Journalists, 2012.



penelitian penulis membahas seputar upaya salah satu organisasi internasional (CPJ) dalam melakukan program perlindungan terhadap jurnalis di Turki.

. Penelitian kedua yaitu penelitian dari Mark Pierini dan Markus Mayr yang berjudul *PersFreedoom in Turkey*.<sup>12</sup> Penelitian ini hampir serupa dengan penelitian pertama yang membahas seputar faktor penyebab kriminalisasi terhadap jurnalis dan media nasional di turki, namun penelitian ini lebih kompleks dengan menyebutkan beberapa faktor. Menurut laporan penelitian ini, dari 44 dari 76 jurnalis yang ditangkap pada tahun 2012 telah didakwa dengan dakwaan yang salah. Pemerintah Turki menuding 44 jurnalis Kurdi terlibat terorisme serta ikut mendukung gerakan pro-Kurdi, termasuk Partai Pekerja Bersenjata Kurdi (PKK). Hakim pengadilan di Kota Istanbul menolak keinginan para terdakwa untuk menyampaikan pembelaan dalam bahasa Kurdi. Selusin jurnalis dituding memimpin organisasi teroris, sisanya anggota. Jaksa menuntut hukuman penjara untuk seluruh terdakwa maksimal 23 tahun.

Kasus ini muncul di tengah peringatan 28 tahun pemberontakan Kurdi di Turki. Ketegangan diperuncing bentrokan PKK dan pasukan keamanan negara itu setahun terakhir. Menurut pegiat dari Kelompok Krisis Internasional (ICG) bermarkas di Ibu Kota Brussels, Belgia, konflik ini menewaskan ratusan jiwa dari kedua belah pihak. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dan Partai Keadilan dan Kesejahteraan miliknya pernah mengusulkan perjanjian damai dan pengakuan hak-hak Kurdi, tapi tidak berjalan. Ribuan politisi dan pendukung Kurdi

---

<sup>12</sup> Mark Pierini dan Markus Mayr, *PersFreedoom in Turkey*, Brussels: Carnegie Endowment for International Peace, 2013

ditahan dan diberi cap teroris dan sebagian lagi dihukum penjara tanpa diadili. Menurut penelitian ini, 68 persen wartawan kurdi yang ditangkap merupakan wartawan yang mengulas isu seputar gerakan suku kurdi, 13 persen mengangkat isu Ergenekon dan sisanya mengangkat isu lain yang berkaitan dengan legitimasi pemerintah.

Meski mengangkat isu yang sama seputar isu jurnalistik di Turki, penelitian dengan penelitian penulis masih mempunyai perbedaan secara spesifik. Jika penelitian terdahulu ini membahas seputar faktor-faktor penyebab kriminalisasi terhadap wartawan atau jurnalis media nasional di Turki, sedangkan penelitian penulis membahas seputar upaya salah satu organisasi internasional (CPJ) dalam melakukan program perlindungan terhadap jurnalis di Turki.

Penelitian ketiga merupakan penelitian dari Friedabia Kosasihaeni Johannes yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Situasi Internal Disturbances And Tension Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Penyerangan Wartawan Di Mesir Tahun 2013)*.<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk skripsi yang membahas seputar perlindungan hukum serta peranan NGO dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi jurnalis internasional yang bertugas di medan perang, khususnya dalam kasus arab spring di Mesir tahun 2013.

Dalam arab spring di Mesir pada 2013, Tercatat 4 orang wartawan tewas saat peristiwa penyerangan itu berlangsung pada 14 Agustus 2013. Mick Deane,

---

<sup>13</sup> Friedabia Kosasihaeni Johannes, *Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Situasi Internal Disturbances And Tension Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Penyerangan Wartawan Di Mesir Tahun 2013)*, Skripsi, Fak. Hukum, Universitas Brawijaya, 2014

wartawan asal Inggris yang bekerja untuk media Sky News tewas tertembak oleh sniper saat tengah meliput masa di depan Masjid Rabaa-AlAdawiya. Ia sempat mendapat perawatan namun akhirnya tewas akibat luka yang di deritanya. Korban lainnya adalah Habiba Ahmed Abd Al-Aziz, Ahmed Abdel Gawad dan Fotografer bernama Mosab El-Shami. Tindak kekerasan juga dialami wartawan, Iman Hilal, salah seorang fotografer dari Koran mesir Al-Masry AlYoum diancam menggunakan pisau oleh salah seorang demonstran Pro Mursi agar ia memberikan memory card kameranya. Berdasarkan data dari *International Federation of Journalists*(IFJ), Hingga bulan Agustus 2013, sebanyak 20 orang wartawan terluka saat tengah meliput konflik di Mesir.

Karena banyaknya wartawan yang menjadi korban dalam konflik ini, maka beberapa NGO dunia bergerak melakukan aksi pembelaan terhadap para korban. IJF misalnya, melalui *Press release* menyatakan bekerja sama dengan EJS untuk menghubungi Jaksa Hisham Barakat, memberikan himbauan kepada otoritas Mesir dan melakukan investigasi. NGO kedua adalah CPJ yang mengirimkan surat kepada Jaksa Umum Mesir pada 10 Desember 2013, yang intinya adalah bahwa meminta diadakannya investigasi kasus pembunuhan wartawan sejak tahun 2011 hingga 2013.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada upaya pembelaan hukum yang dilakukan oleh beberapa organisasi Internasional untuk membela para jurnalis. Perbedaannya terdapat pada isu yang dibahas secara spesifik. Jika penelitian terdahulu ini membahas seputar isu terkait arab spring,

sedangkan penelitian penulis membahas seputar isu yang berkaitan dengan tindakan diskriminatif pemerintah Turki terhadap para jurnalis.

Penelitian terdahulu keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Hakim Syah yang berjudul *Peran Jurnalisme Islam di Tengah Hegemoni Pers Barat dalam Globalisasi Informasi*.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas seputar upaya yang dilakukan oleh jurnalis-jurnalis dari negara Islam guna melawan hegemoni jurnalis barat dalam hal publikasi berita. Selama ini, Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang paling berpengaruh dalam hal hegemoni pers yang menyebabkan ketimpangan konten berita antara jurnalisme Islam dan jurnalisme Barat.

Hingga saat ini, Amerika Serikat mempunyai sekitar 3.800 buah media cetak di seluruh Amerika dan terdapat lebih dari 20 gabungan atau jaringan perusahaan persuratkabaran. Empat media terbesar oplah penjualannya perhari, sebutlah *USA Today* dengan oplah 2.317.000 perhari, *The Wall Street Journal* dengan oplah 1.752.000, *The New York Times* 1.086.000, *Los Angeles Times* 1.078.000, dan *The Washington Post* 824.282. Sedangkan media elektronik terdapat 1100 stasiun pemancar televisi dan 265 di antaranya adalah stasiun non komersial. Beberapa jaringan televisi yang dilayani oleh jaringan televisi komersial, yaitu ABC, CBS, dan NBC yang masing-masing memiliki sekitar 200 stasiun afiliasi yang menyiarkan program-program siarannya. Sementara *The Public Broadcasting System* (PBS) memiliki 265 stasiun yang menyiarkan programnya.

---

<sup>14</sup> Hakim Syah, *Peran Jurnalisme Islam di Tengah Hegemoni Pers Barat dalam Globalisasi Informasi* dalam *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 4, No. 1, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Juni 2014.

Kondisi tersebut jelas jauh berbeda bila dibandingkan dengan dunia media Islam di dunia muslim. Akses dan kekuatan informasi di dunia Islam dalam pembentukan opini publik masih kecil kontribusinya. Inilah sebenarnya yang mengakibatkan Islam menjadi bulan-bulanan citra buruk Barat. Menurut Eli Abel, 90% lalu lintas informasi dunia dikuasai oleh Barat. Agen-agen berita seperti UPI, berpusat di New York, Reuters berpusat di London, *Agence France Presse* (AFP) yang berpusat di Paris, kini mengendalikan pertukaran berita-berita internasional, termasuk ke negara-negara muslim. Sementara Jepang dan Jerman, lewat agen berita *Kyodo News Agencies* dan *Deutsche Presse Agentur*, nyaris menjadi agen berita dunia.

Jurnalis-jurnalis dari negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) tampaknya sadar betul akan ketimpangan arus informasi Barat dengan muslim ini. Untuk melepaskan diri dari dominasi agen-agen berita Barat, OKI lalu mendirikan kantor berita *International Islamic News Agency* (IINA) yang diharapkan mampu menjadi penyeimbang atas informasi dan pemberitaan media Barat yang seringkali bias. Pembentukan IINA tersebut diputuskan pada Konferensi Menteri-Menteri Luar Negeri Islam II tahun 1970. Di penghujung 1979, IINA mulai memberikan pelayanan beritanya lewat bahasa Inggris dan Arab. Kantor berita ini mengaku dapat mengakses informasi mencapai sepuluh ribu sampai duabelas ribu kata per hari. Ia juga mengedarkan buletin berbahasa Spanyol yang dipasok ke Amerika Latin. Lembaga inipun merencanakan untuk membangun jaringan telekomunikasinya sendiri.

Penelitian terdahulu kelima adalah penelitian Indy Nisauf Fikry Sakila yang berjudul *Peran Al-Jazeera dalam transformasi politik Tunisia pada peristiwa Arab Spring 2010-2011*.<sup>15</sup> Sejak kemunculannya pertama kali pada tahun 1996, Al-Jazeera sebagai sebuah media yang berbasis di Doha-Qatar telah membuktikan kemampuannya sebagai media bertaraf Internasional yang mampu bersaing dengan media-media lainnya khususnya media Barat. Sebagai media yang menganggap dirinya sebagai *the voice of voiceless*, Al-Jazeera telah mampu memberitakan konten-konten eksklusif dan mempereratkan penduduk Timur Tengah dalam satu payung dan tujuan bersama.

Tidak hanya sebagai media massa, peran Al-Jazeera juga begitu kompleks, terutama dalam hal perjuangan revolusi di Tunisia. Al-Jazeera telah dianggap sebagai media yang turut andil memperjuangkan revolusi Tunisia pada tahun 2010 hingga 2011 tersebut yang selanjutnya disebut fenomena *Arab Spring*. Adapun peran Al-Jazeera tersebut yaitu telah menginspirasi dan menggerakkan masyarakat Tunisia melalui berita-berita yang disiarkannya sehingga mampu mempengaruhi masyarakat untuk melakukan aksi revolusi Tunisia guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Selain berperan sebagai media penggerak, Al-Jazeera juga berperan sebagai aktor deseminasi berita di Tunisia. Deseminasi berita adalah suatu kegiatan individu atau kelompok yang ditujukan kepada individu dan kelompok lain agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya

---

<sup>15</sup> Indy Nisauf Fikry Sakila, *Peran Al-Jazeera dalam transformasi politik Tunisia pada peristiwa Arab Spring 2010-2011*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

memanfaatkan informasi tersebut yang mampu digunakan sebagai motor penggerak revolusi dan meningkatkan *awareness* penduduk Tunisia.

Penelitian terdahulu keenam adalah peneliian Suci Ayuningtiyas dengan judul *Peran United Nations Woman dalam melindungi hak-hak kaum perempuan Somalia dan pengaruhnya terhadap kesetaraan gender*.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yakni mendesripsikan atau menjelaskan kondisi perempuan sebelum adanya keterlibatan UN Women serta mengetahui peran *UN Women* pasca terkait *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* dalam menyelesaikan permasalahan perempuan di Somalia.

Hasil penelitian yang dapat kita simpulkan bahwa organisasi internasional mengambil peran melalui UN Women dengan kondisi negara Somalia yang tidak stabil antara pemerintah dan masyarakat meliputi kelompok militan maupun warga sipil yang menyebabkan tidak adanya perlindungan bagi korban luka-luka hingga meninggal dunia. Serta dengan adanya badan ini yang bergerak dalam memberdayakan perempuan diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan serta menyembuhkan luka perempuan di Somalia yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan, perlakuan tak adil yang diakibatkan oleh konflik di Somalia.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada tema besar yang sama, yaitu peran organisasi internasional di sebuah negara. Jika penelitian penulis objek penelitiannya adalah CPJ, sedangkan penelitian ini adalah UN

---

<sup>16</sup> Suci Ayuningtiyas, 2016, *Peran United Nations Women Dalam Melindungi Hak-Hak Kaum Perempuan di Somalia Dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender*, Skripsi, Bandung :Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.

Women. Perbedaan juga terdapat pada alat analisa. Dalam penelitian penulis menggunakan alat analisa NGO sebagai *civil society*, sedangkan penelitian terdahulu ini menggunakan konsep peran organisasi internasional.

Penelitian ketujuh adalah penelitian milik A. Fauzan Azhima dengan judul *Keberhasilan Gerakan Zapatista di Meksiko (1994 – 2009) : Analisa Keterhubungan Dengan Masyarakat Sipil Global*<sup>17</sup>, membahas mengenai Zapatista dan gerakan sosial di Chiapas yang memiliki fokus dalam keberhasilan gerakan Zapatista menarik perhatian INGO. Dalam skripsi Fauzan, dijelaskan mengenai hubungan masyarakat domestik dan internasional serta peran kedua belah pihak dalam memberikan dukungan dalam aksi pemberontakan Zapatista.

Dengan berdasar pada penjelasan eksplanatif, skripsi Fauzan lebih berfokus pada pembentukan dan bentuk organisasi gerakan Zapatista serta keberhasilan dan pencapaian dari awal pembentukan gerakan sosial hingga terdapat gerakan-gerakan baru di tahun 2009, serta penjelasan proses per tahun.

Meski memiliki penelitian ini mempunyai isu yang berbeda dengan penelitian penulis, namun konsep yang digunakan dan polanya cenderung sama, yaitu konsep NGO sebagai *civil society* yang manifestasinya terdapat pada Zapatista. Berbeda dengan penelitian penulis yang NGO nya dimanifestasikan oleh alah satu organisasi internasional yaitu CPJ.

---

<sup>17</sup> A. Fauzan Azhima (0706291142), 2011, *Keberhasilan Gerakan Zapatista di Meksiko (1994 – 2009) : Analisa Keterhubungan Dengan Masyarakat Sipil Global*, Skripsi Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia



Penelitian terdahulu keenam adalah Putri Valentina<sup>18</sup> yang berjudul *Keberhasilan Gerakan Perlawanan Non-Violence Zapatista Dalam Perubahan Sistem Politik Meksiko Dari Otoriter Ke Sistem Demokrasi (1994-2000)*. Penelitian ini membahas seputar organisasi Zapatista yang memiliki cara tersendiri guna memobilisasi masa dan bergabung di dalam kelompok ini. Cara yang digunakan Zapatista untuk memobilisasi masa adalah menggunakan peran media. Subcomandante Marcos yang merupakan ketua komandan Zapatista merupakan seorang sarjana sastra yang begitu piawai menulis. Artikel-artikelnya yang mengatasnamakan gerakan Zapatista dan puisi-puisi bermakna dalam mampu menggerakkan hati rakyat sipil. Melalui tulisan-tulisannya, Marcos telah berhasil membuat masyarakat sipil berpihak pada Zapatista. Tulisan-tulisan Marcos sendiri cenderung mengkritisi program pemerintah yang lebih terfokus pada promosi hubungan neoliberalisme ke negara lain, daripada fokus terhadap problematika domestik yang begitu kompleks. Karena tulisan-tulisannya yang begitu bermakna “dalam” dalam mengkritisi pemerintah, Marcos dan Zapatista akhirnya mendapatkan simpati rakyat sipil.

Tujuan utama gerakan Zapatista dalam mendemokratisasikan Meksiko akhirnya tercapai melalui pemilu tahun 2000. Melalui pemilu ini, kekuasaan partai PRI akhirnya tumbang dan dimenangkan oleh Partai Aksi Nasional (PAN). Presiden terpilih dari partai tersebut yaitu Vicente Fox. Fox sendiri merupakan pemilik dari perusahaan *Coca Cola*. Dengan kemenangan Fox ini, otomatis juga

---

<sup>18</sup> Putri Valentina, 2017, *Keberhasilan Gerakan Perlawanan Non-Violence Zapatista Dalam Perubahan Sistem Politik Meksiko Dari Otoriter Ke Sistem Demokrasi (1994-2000)*, Skripsi, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

menjadi akhir dari rezim PRI yang telah memonopoli politik dan pemilu Meksiko selama 71 Tahun. Pemilu tahun 2000 tersebut murni merupakan pemilu paling jujur dan transparan sepanjang 71 tahun.

Sama halnya dengan penelitian ke tujuh, penelitian ini membahas tentang zapatista sebagai sebuah NGO sekaligus gerakan yang berperan dalam demokratisasi Meksiko. Penelitian ini dianalisa menggunakan konsep *civil society*, sedangkan penelitian penulis dianalisa dengan menggunakan konsep NGO sebagai *civil society*. Meski terlihat berbeda, namun tema besar penelitian terdahulu ini dan penelitian penulis masih nampak sama, yaitu menjelaskan tentang objek peran NGO di sebuah negara.

Penelitian kesembilan adalah penelitian Tim CPJ yang berjudul *Challenged in China*.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas seputar kebebasan pers di Tiongkok pada saat Xi Jinping menjabat. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa kebebasan pers di Tiongkok begitu dibatasi. Media elektronik dan media masa lebih cenderung memilih untuk membahas seputar rubrik seni, pendidikan, kebudayaan dan hiburan daripada membahas seputar rubrik politik, karena ketika pembahasan rubrik politik tersebut mempunyai tendensi mengkritik negara, maka media yang bersangkutan akan dibubarkan dan jurnalis yang terkait akan dipidanakan bahkan dihukum mati.

Sejak 2013 hingga saat ini, Tiongkok mulai terancam dengan pesatnya pertumbuhan pengguna sosial media terutama sosial media di Weibo (salah satu sosial media populer di Tiongkok). Rezim Xi Jinping disebutkan mendapatkan

---

<sup>19</sup> Tim CPJ, *Challenged in China*, New York: Committee to Protect Journalists, 2014,

tantangan baru yaitu ekspresi kritik rakyat sipil di media sosial weibo. Sejak maraknya era internet, tak hanya media masa yang menjadi sasaran pemerintah, melainkan rakyat sipil pengguna media sosial. Sejak Xi Jinping menjabat tercatat ratusan rakyat sipil dipidanakan oleh negara karena opini mereka di weibo dan media sosial lainnya yang dianggap menyindir negara.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada tema kebebasan pers di sebuah negara. Jika objek penelitian ini di Tiongkok, sedangkan penelitian penulis di Turki. Meski demikian, penelitian penulis lebih terfokus pada upaya CPJ, tidak hanya mendiskripsikan krisis pers di Turki, layaknya penelitian ini yang hanya mendiskripsikan krisis pers di Tiongkok.

**Tabel 1.1 Posisi Penelitian Terdahulu**

| No. | Penulis/ Judul Penelitian   | Metodelogi/Alat Analisa                              | Hasil Penelitian   |
|-----|---|--|--|
| 1   | Tim CPJ/ <i>Turkey's PersFreedom Crisis The Dark Days of Jailing Journalists and Criminalizing Dissent.</i> | <b>Deskriptif/ konsep persfreedom</b>                | Menurut penelitian ini jumlah wartawan yang dipenjara pda tahun 2012, 70% di antaranya berasal dari Kurdi. Penelitian ini menyebutkan bahwa faktor utama kriminalisasi jurnalis Turki karena mereka mengangkat isu seputar etnis kurdi yang dianggap sangat sensitif bagi rezim kala itu |
| 2   | Mark Pierini dan Markus Mayr/ <i>Pers Freedom in Turkey.</i>  | <b>Deskriptif/ konsep HAM dan konsep persfreedom</b> | Penelitian ini membahas seputar fator-faktor penyebab tindakan diskriminatif pemerintah terhadap jurnalis lokal. Menurut penelitian ini, 68 persen wartawan kurdi yang ditangkap   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | merupakan wartawan yang mengulas isu seputar gerakan suku kurdi, 13 persen mengangkat isu ergenekon dan sisanya mengangkat isu lain yang berkaitan dengan legitimasi pemerintah  |
| 3 | Friedabia Kosasihaeni Johannes/ <i>Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Situasi Internal Disturbances And Tension Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Penyerangan Wartawan Di Mesir Tahun 2013).</i> | <b>Deskriptif/Konsep Perlindungan hukum bagi wartawan menurut hukum internasional</b> | Berikut hasil dari penelitian ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IJS menyatakan bekerja sama dengan EJS untuk menghubungi Jaksa Hisham Barakat, memberikan himbauan kepada otoritas Mesir dan melakukan investigasi.</li> <li>2. CPJ mengirimkan surat kepada Jaksa Umum Mesir pada 10 Desember 2013, yang intinya adalah bahwa meminta diadakannya investigasi kasus pembunuhan wartawan sejak tahun 2011 hingga 2013.</li> </ol> |
| 4 | Hakim Syah/ <i>Peran Jurnalisme Islam di Tengah Hegemoni Pers Barat dalam Globalisasi Informasi</i>   | <b>Deskriptif/Konsep Jurnalisme Islam</b>   | Penelitian ini membahas seputar upaya yang dilakukan oleh jurnalis-jurnalis dari negara Islam guna melawan hegemoni jurnalis barat dalam hal publikasi berita. Guna untuk semakin merduksi hegemoni pers Barat, jurnalis-jurnalis dari negara Islam OKI lalu mendirikan kantor berita  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | <i>International Islamic News Agency (IINA)</i> yang diharapkan mampu menjadi penyeimbang atas informasi dan pemberitaan media Barat yang seringkali bias.  |
| 5 | Indy Nisauf Fikry Sakila/ <i>Peran Al-Jazeera dalam transformasi politik Tunisia pada peristiwa Arab Spring 2010-2011</i>                       | <b>Deskriptif/Teori Efek Media Masa</b>                  | Penelitian ini membahas peran penting Al-Jazeera dalam revolusi Tunisia 2010-2011. Peran media ini dalam kasus tersebut dibagi menjadi dua yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stimulator Revolusi Arab Spring, khususnya di Tunisia.</li> <li>2. Aktor deseminasi berita di Tunisia.</li> </ol>   |
| 6 | Suci Ayuningtyas / <i>Peran United Nations Woman dalam melindungi hak-hak kaum perempuan Somalia dan pengaruhnya terhadap kesetaraan gender</i> | <b>deskriptif/ Konsep Peran Organisasi Internasional</b> | Organisasi internasional mengambil peran melalui UN Women dengan kondisi negara Somalia yang tidak stabil antara pemerintah dan masyarakat meliputi kelompok militan maupun warga sipil yang menyebabkan tidak adanya perlindungan bagi korban luka-luka hingga meninggal dunia. Adanya UN Women juga dapat menciptakan kesejahteraan serta menyembuhkan luka perempuan di Somalia yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan, perlakuan tak adil yang diakibatkan oleh konflik di Somalia |
| 7 | A. Fauzan Azhima / <i>Keberhasilan Gerakan Zapatista di Meksiko (1994-2009) : Analisa</i>   |  | Penelitian ini membahas seputar hubungan gerakan Zapatista yang membuka diri untuk mendapat   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | <i>Keterhubungan Dengan Masyarakat Sipil</i>   |   | bantuan dari INGO dan masyarakat global, memberikan informasi tajam mengenai kerjasama Zapatista dengan INGO, tahun 1994-2001 sebagai pengantar, hingga tahun 2002 -2009 sebagai inti pembahasan dan pembuktian keberhasilan gerakan Zapatista dalam ranah global  |
| 8 | Putri Valentina / <i>Keberhasilan Gerakan Perlawanan Non-Violence Zapatista Dalam Perubahan Sistem Politik Meksiko Dari Otoriter Ke Sistem Demokrasi (1994-2000)</i> | <b>Deskriptif/ Civil Society</b>        | Penelitian ini menyebutkan bahwa tujuan utama gerakan Zapatista dalam mendemokratisasikan Meksiko akhirnya tercapai melalui pemilu tahun 2000. Melalui pemilu ini, kekuasaan partai PRI yang selama ini memimpin selama 30 tahun secara otoriter akhirnya tumbang dan dimenangkan oleh Partai Aksi Nasional (PAN).   |
| 9 | Tim CPJ/ <i>Challenged in China</i>  | <b>Deskriptif/ Konsep Press Freedom</b> | Penelitian ini membahas seputar rezim Xi Jinping disebutkan mendapatkan tantangan baru yaitu ekspresi kritik rakyat sipil di media sosial weibo. Sejak maraknya era internet, tak hanya media masa yang menjadi sasaran pemerintah, melainkan rakyat sipil pengguna media sosial. Sejak Xi Jinping menjabat tercatat ratusan rakyat sipil dipidanakan oleh negara karena opini mereka di weibo dan media sosial lainnya yang |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | dianggap menyindir negara.   |
| 10 | Pebklinen Wahyu Putra Ramadhan/ <i>Peran Committee To Protect Journalists (Cpj) Dalam Melindungi Kebebasan Jurnalis Di Turki</i> | <b>Deskriptif/ Non Government Organization sebagai civil Society</b> | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CPJ sebagai salah satu NGO internasional telah berhasil mengupayakan kebebasan pers di Turki. meski tidak sepenuhnya berhasil. Organisasi ini telah berkontribusi dalam meningkatkan transparansi proses persidangan para jurnalis dan membebaskan beberapa jurnalis. |

## 1.5 Konsep dan Teori

### *Non Government Organization sebagai civil Society*

Guna menganalisa penelitian ini, penulis juga perlu menambahkan sebuah teori sebagai alat analisa tambahan. Konsep yang penulis gunakan adalah *Non Government Organization* (NGO) sebagai *civil society*. Konsep ini nantinya akan menjelaskan seputar relevansi dari NGO dan civil society yang mempunyai hubungan keterkaitan dalam menjadi sebuah agen perubahan di suatu negara.

Menurut definisi PBB, *No Government Organization* (NGO) adalah sebuah organisasi nirlaba yang bersekala lokal, nasional atau Internasional yang berorientasi pada tugas dan misi tertentu. Umumnya NGO akan bertugas melakukan pelayanan publik secara cuma-cuma yang bergerak dalam hal kemanusiaan, *bring citizens' concerns to Governments*, *monitoring* isu-isu tertentu dalam duniapolitik dan pemerintahan, dan mendorong partisipasi politik

masyarakat umum. NGO juga biasanya bergerak dalam memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, hak asasi manusia dan kesehatan.<sup>20</sup>

Secara umum, NGO dibedakan menjadi dua jenis kategori. Kategori yang pertama adalah NGO yang berorientasi pada aksi dan program kerja dan kategori kedua adalah NGO yang bergerak sebagai fungsi lembaga donor. NGO dalam kategori yang pertama umumnya bergerak dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan, perdamaian, kedilan dan sebagainya. Jenis NGO ada kategori yang kedua adalah NGO yang menjadi sebuah lembaga donor bagi NGO kategori pertama atau donor secara langsung pada objek-objek tertentu. Umumnya NGO jenis kedua mendapatkan sumber donasi dari sumber perorangan, usaha komersial dan alokasi dana dari lembaga-lembaga internasional.<sup>21</sup>

Beralih pada terminologi *civil society*. *Civil society* sendiri merupakan sebuah konsep yang berasal dari Yunani. Aristoteles memandang *civil society* (masyarakat sipil) sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana *civil society*. Pada masa Aristoteles, *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah *koinonia politikke*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan

---

<sup>20</sup> NGO menurut PBB, dalam Wei Wu, *Building Service-oriented Government: Lessons, Challenges and Prospects*, Singapura: World Scientific Publishing, 2013, h. 105

<sup>21</sup> Khrisna Anggara, *Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat*, diakses dalam: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/120657-T%2025573-Pemberdayaan%20Lembaga-Literatur.pdf>, 13 Juni 2017, pukul 23.00 WIB.



keputusan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum.<sup>22</sup>

Sejarah *civil society* pada awalnya merupakan konsep sekuler karena adanya penentangan ilmuwan pada kekuasaan gereja yang *absolut* di abad pertengahan. Kemudian berlanjut pada lahirnya sikap liberal yang mengakui hak-hak dasar individu untuk mengartikulasikan otonomisasi di setiap pilihan-pilihan hidupnya. Akibat adanya sikap liberal ini maka ia membutuhkan ruang umum dan jaminan hukum serta *public discourse*. Karena itu, berbicara *civil society* dengan segala variannya tentu meniscayakan adanya “lahan atau ruang” dan nilai-nilai, serta tentu saja kesiapan rasional yang argumentatif.<sup>23</sup>

*Civil society* atau masyarakat madani merupakan konsep yang memiliki banyak arti dan sering dimaknai secara berbeda. Namun semua ahli sepakat bahwa harus ada partisipasi yang bersifat sukarela dari sebagian warga masyarakat, tidak termasuk perilaku yang dilakukan karena keterpaksaan. Menurut A.S. Hikam, beberapa ahli juga menyepakati pendapat yang menyatakan bahwa adanya aktivitas politik melalui lembaga-lembaga non-profit semacam *non-government organization* (NGO) juga dapat disebut *civil society*. A.S. Hikam, berpendapat bahwa *civil society* secara institusional diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 242

<sup>23</sup> Chandhoke Nara. *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta, ISTAWA, 2001. h. 34

<sup>24</sup> Muhammad, A.S. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES Indonesia, 2003, h. 2

Sementara itu, Meutia Ganie-Rochman menyebutkan adanya tiga elemen dasar dari *civil society* yaitu:<sup>25</sup>

1. Orientasi bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara tidak dominan ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu kelompok-kelompok masyarakat adalah salah satu sumber perubahan.
2. Sangat dibutuhkan ketrampilan berorganisasi dengan prinsip demokratis.
3. Keharusan adanya perilaku yang menghormati etika.

Dari tiga elemen dasar *civil society* di atas, menurut Meutia poin pertama dengan jelas mengakui pentingnya keberadaan NGO sebagai bagian dari *civil society* yang bergeak dalam hal-hal yang berhubungan dengan perubahan, karena pada kenyataannya aktor perubahan tidak hanya didominasi oleh lembaga pemerintahan.

Berdasarkan definisi konsep di atas, dapat dilihat bahwa NGO merupakan bagian dari *civil society*, yang bergerak secara sukarela dalam menjadi agen perubahan. Operasionalisasi konsep ini dalam penelitian penulis akan terlihat dari upaya yang dilakukan oleh CPJ guna melindungi hak-hak jurnalis di Turki. CPJ sendiri merupakan organisasi non pemerintahan yang selanjutnya merupakan representasi dari NGO dalam melawan *arbitrary* pemerintah Turki dalam memperlakukan media dan jurnalis.

---

<sup>25</sup> Meuthia-Ganie-Rochman dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed), *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, LP3ES, Jakarta, 2002, h. 185

NGO juga dapat disebut sebagai manifestasi dari *Global civil society*. *Global civil society* atau masyarakat sipil global merupakan bentuk dari masyarakat sipil yang terhimpun guna menyelesaikan masalah-masalah internasional, seperti isu kemiskinan, HAM, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada fakta yang ditemukan sekali asosiasi-asosiasi atau lembaga sosial masyarakat atau NGO yang telah terbentuk guna menyelesaikan permasalahan internasional.

Berbeda halnya dengan IGO, NGO dibentuk berdasarkan individu-individu yang berkolektif dan memiliki misi dan tujuan yang sama, bukan didasarkan pada sebuah perjanjian-perjanjian atau deklarasi anggota negara.<sup>26</sup> Berdasarkan definisi ini, dapat dilihat bahwa CPJ merupakan salah satu bentuk NGO dengan program kerja secara internasional seperti halnya isu yang terjadi di Turki terkait krisis pers dan media. Operasionalisasi konsep ini selanjutnya akan menjelaskan peran CPJ dan seberapa jauh output hasil program kerja CPJ di Turki.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang sangat sesuai untuk digunakan dalam meneliti fenomena yang telah terjadi. Penelitian ini umumnya akan menjawab pertanyaan ‘bagaimana’ dari sebuah penelitian. Jenis penelitian ini umumnya digunakan untuk mendeskripsikan

---

<sup>26</sup> Mary Kaldor, *The Idea of Global Civil Society*, dalam jurnal *International Affairs Royal Institute of International Affairs*, Vol. 79, No. 3, 2003, h. 583-590

suatu peristiwa-peristiwa yang telah terjadi berdasarkan data-data yang telah dianalisis secara sistemis.<sup>27</sup>

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang penulis peroleh dari *library research* yang berasal dari buku, jurnal *online* maupun *offline*, website resmi, dan persrelease resmi dari *Committee To Protect Journalists* (CPJ) serta sumber-sumber akurat lainnya yang kemudian diolah dengan menggunakan alat analisa penelitian secara mendalam terhadap data tersebut.

### 1.6.3 Teknik Analis Data

Dalam menganalisa isi pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. Hal ini amat sesuai dengan teknik pengumpulan data yang penulis ambil. Menurut Ulber Silalahi penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistic* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah,<sup>28</sup> yang kemudian hasilnya dianalisa berdasarkan, teori, pendekatan atau konsep yang penulis ambil dalam penelitiannya.

---

<sup>27</sup> W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, h. 19-20

<sup>28</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Anggota Ikapi, 2010 h.77

## **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.4.1 Batasan Materi**

Batasan materi dalam penelitian ini hanya penulis fokuskan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang ditempuh oleh CPJ dalam memberikan perlindungan dan pembelaan hak-hak Jurnalis Turki. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan seputar orientasi dan cara kerja CPJ dalam memberikan perlindungan dan pembelaan hak-hak Jurnalis Turki.

### **1.6.4.2 Batasan Waktu**

Dalam menyusun penelitian ini penulis memfokuskan pada tahun 2012-2016. Batasan waktu ini penulis pilih mengingat rentang waktu tersebut merupakan waktu dimana banyak jurnalis-jurnalis media nasional Turki yang telah menjadi korban tindakan diskriminatif pemerintah hingga berujung pada hukuman penjara dan PHK. Hal ini kemudian menjadikan Turki sebagai negara terburuk bagi para jurnalis pada tahun 2016.

## **1.7 Argumentasi Dasar**

Dalam sebuah penelitian, argumentasi dasar dibutuhkan guna memperkuat kelayakan sebuah penelitian sebelum dirampungkan, selain itu argumentasi dasar juga dibutuhkan guna sebagai asumsi awal dari isi sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis bahas di atas, dapat dilihat bahwa *Committee To Protect Journalists* CPJ sebagai salah satu organisasi nonprofit yang bergerak

dalam hal perlindungan jurnalis, telah berusaha untuk melakukan upaya perlindungan terhadap para jurnalis di Turki. CPJ tidak hanya membagikan data-data seputar isu-isu yang berkaitan dengan tindakan diskriminatif yang dialami para jurnalis di Turki, melainkan juga turut andil dalam membela dan melindungi para jurnalis nasional di Turki. Beberapa upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh CPJ terkait kasus yang menimpa beberapa jurnalis di Turki adalah memberikan bantuan berupa upaya advokasi bagi para jurnalis yang ditangkap, mengirimkan surat teguran dan surat *lobbying* terhadap pemerintah Turki dan upaya-upaya konkret lainnya. Upaya yang dilakukan CPJ ini selanjutnya mempunyai relevansi yang kuat dengan konsep *Non Government Organization sebagai civil Society* yang berupaya menjadi agen perubahan bagi kebebasan pers di Turki. Berdasarkan konsep *Non Government Organization sebagai civil Society*, CPJ merupakan kategori NGO, karena berorientasi pada aksi dan program kerja yang berhubungan dengan hak asasi manusia, perdamaian, kedilan dan sebagainya.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan diperlukan guna membuat sebuah penelitian semakin mudah dipahami dan berjalan sesuai alur yang telah ditentukan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis buat dalam bentuk tabel guna membuat rincian sub bab penulis semakin jelas. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b> | <b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|

|   |   |
|---|---|
|   | 1.2 Rumusan Masalah<br>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian<br>1.3.1 Tujuan Penelitian<br>1.3.2 Manfaat Penelitian<br>1.4 Penelitian Terdahulu<br>1.5 Teori/ Konsep<br>1.6 Metode Penelitian<br>1.6.1 Jenis Penelitian<br>1.6.2 Teknik Analisa Data<br>1.6.3 Teknik Pengumpulan Data<br>1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian<br>1.7 Argumentasi Dasar<br>1.8 Sistematika Penulisan |
| <b>BAB II: KONDISI PERS DI TURKI DAN <i>COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS</i> (CPJ)</b>                    | 2.1 Kondisi Pers di Turki<br>2.2 <i>Committee To Protect Journalists</i> (CPJ)<br>2.3 Tugas Dan Fungsi <i>Committee To Protect Journalists</i> (CPJ)  |
| <b>BAB III: UPAYA ADVOKASI <i>COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS</i> (CPJ) DALAM MEMBELA JURNALIS TURKI</b> | 3.1 Upaya Advokasi CPJ dalam krisis pers di Turki..<br>3.1.1 Pengajuan <i>Annual Report</i> .<br>3.1.2 Mobilisasi melalui <i>Turkey Crackdown Chronicle</i>   |

|  |   |
|--|---|
|  | 3.2 Dampak Upaya Advokasi<br><i>Committee To Protect Journalists</i> (CPJ) di Turki   |
| <b>BAB IV: UPAYA REKONSILIASI <i>COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS</i> (CPJ) DALAM MEMBELA JURNALIS TURKI</b> | 4.1 Upaya Rekonsiliasi CPJ dalam krisis pres di Turki.<br>4.1.1 Surat Diplomatik Untuk Erdogan<br>4.1.2 Petisi UU Terorisme dan Pers Turki<br>4.2 Dampak Upaya Rekonsiliasi<br><i>Committee To Protect Journalists</i> (CPJ) di Turki |
| <b>BAB V: PENUTUP</b>  | 5.1 Kesimpulan.<br>5.2 Saran  |